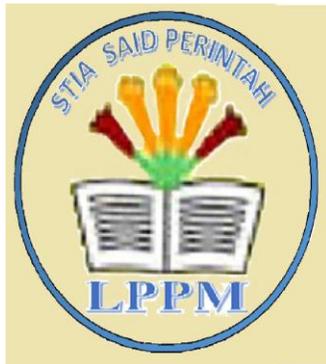

Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis

Peran Pemerintah Dalam Pendidikan Anak Suku Togutil

Telly Muriany¹
Victor Ruhunlela²

¹ Universitas Darussalam,
Ambon, Maluku, Indonesia

² Universitas Pattimura,
Ambon, Maluku, Indonesia
tellymuriany@yahoo.co.id



LPPM STIA Said Perintah

Volume 5, No. 1, Maret 2024

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Received; 2023 - 12 - 03

Accepted; 2023 - 12 - 09

Published; 2023 - 12 - 16



The editorial board holds publication rights for articles under a CC BY SA license, allowing distribution without separate permission if credited. Published articles are openly accessible for research, with no liability for other copyright violations (<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/kabijakankebijakan>).



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstract

The study aims to analyze and describe the role of government in the education of Togutil children in Baburino village, Maba sub-district, East Halmahera district, and North Maluku province. This study is a descriptive-qualitative study. The informants for this study were five people who were determined to use deliberate techniques. The data collection techniques used were observation, interviews, and notes, and the analysis techniques used were data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show: 1) The government's role in educating Togutil children is very good now because the government is trying to build education in Baburino village, create conditions for Togutil children of Baburino village to 'go to school in the neighboring village, and prepare formal educational facilities for Togutil children. 2) Factors that can influence the role of government in the education of Togutil children in Baburino village, Maba sub-district, East Halmahera district, and North Moluccas province are school facilities and infrastructure, socialization factors, and economic factors.

Keywords : Government Role, Education, Togutil Tribe Children.

Pendahuluan

Suku Tugutil sebagai salah satu dari suku terasing (*isolated tribes*) yang hidup tersebar di Pulau Halmahera (Mawikere Marde Christian Stenly, 2022) sebagai penghuni kampung dan hutan di wilayah Halmahera bagian tengah, yakni di Buli, Maba dan Wasile serta di wilayah Halmahera bagian utara, yakni di Kao, Weda, Galela dan Tobelo. Ketergantungan mereka pada alam membuat mereka memiliki pola kehidupan yang nomaden. Mata pencaharian mereka adalah berburu, menangkap ikan, mencari dan mengumpulkan hasil hutan, serta memanfaatkan sagu sebagai sumber makanan utama.

Bagi orang Ternate kata "Togutil" sebagai sebuah istilah yaitu identik dengan makna kata "*primitive*", "*keterbelakangan*", "*kebodohan*" atau "*ketertinggalan*" (Doa Busranto Latif, 2009) serta banyak lagi konotasi-konotasi yang bermakna serupalainnya. Warga suku Togutil hidup dalam kondisi primitive, bahkan tidak mengenal huruf. Mereka juga terlihat bertelanjang dada. Suku Togutil sebenarnya telah mengenal peradaban luar, namun mereka memilih menjauhi modernitas (*Mengenal Suku Togutil Di Pedalaman Halmehera Tengah Panjimas*, n.d.). Tradisi turun temurun membawa mereka ke kerangka hidup sederhana yang terus dipertahankan.

Dilihat dari sisi pendidikan, anak-anak suku Togutil mulai mengenal dunia pendidikan, meskipun masih sebatas Sekolah Dasar. Hasan Bahrudin, (2021) mengatakan bahwa fasilitas pendidikan yang ada di suku tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan suku lainnya di Halmahera Timur. Padahal dengan adanya pengaruh pendidikan ini, anak-anak suku Togutil memiliki keinginan dan cita-cita. Hal ini memengaruhi cara dan kebiasaan belajar anak-anak suku Togutil. Untuk memiliki kebiasaan belajar, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Kebiasaan belajar yang baik tidak mampu dibentuk dalam waktu yang singkat satu hari atau satu malam, tetapi dibutuhkan proses yang cukup lama atau secara perlahan-lahan. Selain itu, kondisi sekolah yang berada di dusun mereka masih menggunakan Balai Pertemuan yang dibangun oleh Kementerian Sosial yang berkedudukan tepat di depan kampung mereka, sangat memprihatinkan. Sekolah yang mereka gunakan tersebut merupakan sekolah darurat yang induk sekolahnya berada di desa Tukur-Tukur (Nadra Wawan Suprianto et al., 2016).

Kodisi nyata suku Togutil ini sejalan dengan pendapat Hasmawati et al., (2020) yang menyatakan bahwa kondisi perkembangan pendidikan formal suku Togutil di Desa Lili Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur mengalami perkembangan walaupun masih terhambat kendala ekonomi. Bagi generasi muda pada khususnya setelah ada

pendidikan formal di harapkan agar lebih meningkatkan lagi minat belajar dan pola pikirnya sehingga berubah dalam berbagai bidang, baik bidang pendidikan, bidang ekonomi, maupun budaya dan lain-lain sehingga menjadi landasan dalam memperbaiki kehidupan keluarga.

Peran Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan adalah untuk mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggara pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Kabupaten, utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak, hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memberikan penjelasan bahwa pada tahun 2016 - 2022 kondisi anak putus sekolah telah mencapai 2.427 anak yang terdiri dari tingkat SD sebanyak 994 anak, tingkat SMP 870 anak dan tingkat SMA sebanyak 563 anak. Kondisi anak putus sekolah untuk anak usia sekolah tentunya sangat memprihatinkan. Kondisi anak putus sekolah sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Suku Togutil adalah kelompok/komunitas etnis yang hidup di hutan-hutan secara nomaden di sekitar hutan (Bayau et al., 2019). Kehidupan mereka masih sangat tergantung pada keberadaan hutan-hutan asli. Mereka bermukim secara berkelompok di sekitar sungai (Risnawati et al., 2022). Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan tingkat usia dapat dilihat pada tabel berikut.

Jumlah Penduduk Suku Togutil Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 10 Tahun	9	11	20
2.	11 – 20 Tahun	14	28	42
3.	21 – 30 Tahun	25	31	56
4.	31 – 40 Tahun	32	39	71
5.	>41 Tahun	47	42	89
Total		127	151	278

Sumber; Hasil penelitian, (2023)

Dilihat dari sisi pendidikan, anak-anak suku Togutil mulai mengenal dunia pendidikan, meskipun masih sebatas Sekolah Dasar. Hal ini memengaruhi cara dan kebiasaan belajar anak-anak suku Togutil. Anak-anak suku Togutil memiliki kebiasaan belajar yang waktunya tidak

menentu. Artinya, mereka belajar sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Terkadang sebagian dari mereka bermain dan sebagian lagi memilih untuk belajar (Nadra Wawan Suprianto et al., 2016). Data keadaan pendidikan suku Togutil dapat dilihat pada tabel berikut.

Keadaan Pendidikan Suku Togutil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	5	7	12
2.	Tidak Tamat SD	5	7	12
3.	Tidak Tamat SMP	3	9	12
4.	Tidak Tamat SMA	10	16	26
Total		23	39	62

Sumber; Hasil penelitian, (2023)

Data keadaan Pendidikan ini menunjukkan bahwa suku Togutil membutuhkan dukungan dari berbagai pihak secara khusus dibidang Pendidikan. Selain itu juga peran orang tua sangat dibutuhkan dalam merubah paradigma Pendidikan. Orang tua mereka lebih cenderung mengajak anak-anak mereka untuk membantu berburu atau mencari makan di hutan. Sebagian dari mereka tidak memedulikan anak-anak untuk sekolah sehingga anak-anak mereka ada yang nyaris berhenti sekolah karena tidak ada dukungan dari orang tua juga lokasi pemukiman yang di tempati oleh suku Togutil menuju perkampungan sangat jauh (Nadra Wawan Suprianto et al., 2016).

Pemukiman yang ditempati oleh komunitas suku Togutil dengan fasilitas pendidikan yang terletak di induk perkampungan jaraknya cukup jauh kurang lebih 10 km. Jalan yang menghubungkan antara tempat tinggal komunitas suku Togutil dengan induk perkampungan tidak terdapat jalan yang aspal. Untuk pergi kesekolah biasanya anak-anak menempuh dengan jalan kaki karena tidak ada transportasi mobil atau sarana angkutan lainnya. Beberapa idikasi yang ditemukan bahwa pemerintah belum secara optimal dalam mempedulikan pendidikan anak suku Togutil baik pendidikan dasar maupun atas (Kabupaten dan Propinsi). Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pemerintah dalam pendidikan anak Suku Togutil di Desa Baburion Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara.

Tinjauan Pustaka

Konsep Peranan Pemerintah

Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam menjalankan kehidupan sosial. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia mempunyai cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi berdasarkan latar belakang kehidupannya. Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Peranan dapat mengiringi seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran merupakan sebagai arahan pada proses dalam bersosialisasi, warisan tradisi, kepercayaan, norma-norma, nilai-nilai, dan pengetahuan. Peran bisa menyatukan dua kelompok atau masyarakat banyak, dan juga bisa memberikan energi terhadap sistem kontrol dan pengendalian, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (Bagong Suyanto, n.d.). Menurut Soekanto bahwa peran merupakan sebuah aspek dinamis kedudukan (*status*) jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka orang itu sedang menjalankan suatu peran. Sedangkan makna peran dalam *status* masyarakat dapat dijelaskan dengan beberapa pengertian yaitu Pengertian secara *histories* dan pengertian menurut ilmu sosial (Soekanto, 2014).

Menurut penjelasan *histories*, konsep peran semula yang memiliki hubungan erat seputar drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno. Dalam hal ini, peran merupakan karakter dan diperankan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial, peran merupakan perangkat harapan-harapan yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat. Setiap manusia memiliki berbagai macam peran yang berawal dari lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (Soekanto, 2014).

Asal-usul kata "pemerintah" dapat ditelusuri dari kata "perintah". Menurut Kamus Bahasa Indonesia, "perintah" mengacu pada perkataan yang mencakup instruksi untuk melakukan sesuatu atau tindakan yang diwajibkan. Pemerintah, dalam konteks ini, merujuk kepada individu, badan, atau aparat yang mengeluarkan atau memberikan perintah. Pengertian "pemerintahan" dan "pemerintah" dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti luas, "pemerintahan" mencakup semua tugas dan kewenangan negara, sesuai dengan pembagian bidang menurut Montesquieu, yang memasukkan eksekutif, yudikatif, dan legislatif

sebagai bagian dari pemerintahan. Sementara itu, "pemerintah" dalam arti sempit diartikan sebagai tugas dan kewenangan negara yang terfokus pada bidang eksekutif saja.

Pada prinsipnya, pemerintah merupakan sebuah kelompok individu yang diberi kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk mengatur interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengaturan ini melibatkan berbagai aspek, seperti interaksi antar individu, interaksi antara individu dan lembaga pemerintah, interaksi antar lembaga pemerintah, interaksi antara lembaga pemerintah dan pihak swasta, serta interaksi antara pihak swasta dan individu. Interaksi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga keberlangsungan interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis (Dharma Setyawan Salam, 2007). Pemerintah memiliki kewenangan untuk menyediakan layanan publik dan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan sipil kepada setiap individu melalui hubungan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat berhak menerima layanan tersebut saat dibutuhkan, sesuai dengan harapan yang ditetapkan. Dalam konteks ini, bahkan warga negara asing atau siapa pun yang secara sah berada di wilayah Indonesia memiliki hak untuk menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan tersebut.

Konsep Pendidikan

Konsep pendidikan terkait erat dengan istilah pedagogik yang berarti ilmu pendidikan. Tanlain, (1989) memberi penjelasan tentang ilmu pendidikan sebagai berikut, Pedagogik berasal dari kata bahasa Yunani *pedagogues*, dalam bahasa Latin *pedagogus* yang berarti pemuda yang bertugas mengantar anak ke sekolah serta menjaga anak itu agar bertingkah laku susila dan disiplin; jika perlu anak dipukul bilamana ia nakal. Istilah itu lalu digunakan untuk pendidik (pedagog) dan perbuatan mendidik (pedagogi) serta ilmu pendidikan (*pedagogiek*). Berdasarkan sumber yang sama dapat diperoleh keterangan bahwa *pedagogiek* diindonesiakan menjadi pedagogik yang dalam bahasa Inggrisnya pedagogy, yaitu *the study of educational goals and processes*.

Pendidikan juga dapat dilacak dari kata *educare* yang berasal dari *e-ducare* yang artinya menggiring ke luar. *Educare* dapat diartikan usaha pemuliaan manusia atau pembentukan manusia (Drost, 2006). Lebih lanjut konsep pendidikan dapat diberi batasan yang berbeda-beda sesuai sudut pandangnya, antara lain; filosofis, psikologis, etis, sosiologis dan teologis. Secara filosofis, pendidikan dapat dipandang sebagai proses memanusiakan manusia lewat pembudayaan atau proses hominisasi dan humanisasi. Proses tersebut terwujud dalam

mendidik dan dididik. Pendidikan harus ditelaah secara ilmiah, bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Kritis, berarti semua pernyataan dan afirmasi memiliki dasar yang kuat, metodis berarti proses berpikirdan penyelidikan dengan cara tertentu, dan sistematis berarti berdasar idea yang menyeluruh sebagai kesatuan yang saling terkait.

Drijarkara, (1980) mengatakan bahwa secara psikologis, pendidikan adalah proses pendewasaan anak muda oleh orang dewasa yang susila. Pendewasaan tersebut terlaksana dalam bentuk lahir (pertumbuhan fisik) maupun batin (perkembangan mental). Secara etis, pendidikan merupakan proses transfer nilai-nilai kemanusiaan dalam pembentukan manusia dewasa yang susila. Secara sosiologis, pendidikan dapat dipandang sebagai proses pembentukan anggota masyarakat yang berjiwa sosial, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara, yang berguna bagi orang lain (kekitaan). Sedang secara teologis, pendidikan dapat dipandang sebagai proses pembentukan warga surgawi (civitas Dei).

Pasal 1 nomor 1 undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa;

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan mempunyai tujuan yang luas untuk mendorong pertumbuhan nasional, yaitu menghasilkan tenaga pengembangan profesional yang mampu menguasai iptek. Pendidikan pada dasarnya adalah pemberdayaan, dalam arti mengungkapkan kapasitas yang ada didalam diri manusia sebagai seseorang yang dapat mengarah pada pemberdayaan kelompok masyarakat dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang bertumpu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tertanam dalam cita-cita agama, budaya bangsa Indonesia, dan terbuka terhadap perkembangan zaman.

Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan peran aktif pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi; penyelenggaraan Pendidikan dan penanggulangan masalah sosial. Hal ini tentunya memberikan kewenangan pemerintah daerah setempat dalam membangun daerahnya sendiri termasuk masyarakat di dalamnya untuk diberdayakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif menurut Bogdad dan Taylor dalam (Moleong & Surjaman, 2018) mengatakan bahwa, metode data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dipilih untuk menyajikan data secara sistematis yang ada di lapangan mengenai peran pemerintah dalam pendidikan anak Suku Togutil di Desa Baburion Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah; observasi, wawancara dan studi dokumen.

Penelitian ini menggunakan informan atau narasumber sebagai sumber data utama. Adapun informan-informan yang ditentukan merupakan orang-orang yang menurut penulis memiliki informasi yang memberikan data atau informasi yang valid kepada penulis di lapangan. Narasumber atau informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, Kepala dinas pendidikan Kabupaten Halmahera, Kepala Desa Baburion dan Masyarakat Suku Dalam Desa Baburion. Analisis data penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis yang digunakan yaitu melakukan; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Suku atau orang Togutil" atau *Togutil* ternyata kurang dikenal atau kurang populer, secara khusus di kalangan orang Tugutil sendiri. Penggunaan istilah "orang Tugutil" terbatas, baik dikalangan orang Tugutil sendiri maupun dikalangan orang-orang kampung di sekitar mereka (*o bereraka ma nyawa*). Misalnya, bagi masyarakat yang tinggal di kampung dan hutan Dodaga di Wasile, pada umumnya penduduk disana keberatan apabila mereka disebut "orang Tugutil" karena bagi mereka, orang Tugutil adalah kelompok yang masih hidup liar jauh di pedalaman hutan seperti di Totodoku dan Buli (Martodirjo, 1984, 1991). Karena itu dalam kesehariannya, mereka lebih senang disebut *o hongana ma nyawa* atau *o fongana ma nyawa* atau manusia yang hidup dan tinggal didalam hutan, yang dibedakan dengan *o berera ma nyawa* atau manusia yang hidup dalam kampung di pesisir pantai. Bagi orang Tugutil,

panggilan *o hongana ma nyawa* justru membuat mereka merasa sangat bangga, karena hidup mereka dekat dengan ekologi dan ekosistem di hutan atau pedalaman (Duncan, 1997).

Pada umumnya terdapat persamaan antara orang Tugutil di pelosok Wasile, Buli, Weda, Kao dan tempat-tempat lain dengan orang Tobelo yang adalah *ethnic group* terbesar di pulau Halmahera (Martodirjo, 1984, 1991). Kemungkinan besar, orang Tugutil merupakan salah satu kelompok dari *Tobelo ma nyawa* yang tingkat kehidupannya masih sangat sederhana dan lebih senang tinggal dengan cara nomaden dalam hutan maupun di pedalaman yang terpisah dari daerah pesisir pantai (Prakoso Aji, 2019). Karena itu, orang Tugutil sering juga disebut sebagai "orang Tobelo dalam".

Asumsi yang menegaskan bahwa sebenarnya orang Tugutil adalah orang Tobelo ini berdasarkan beberapa aspek pertimbangan. Pertama, dari segi bahasa bahwa satu-satunya bahasa lokal yang digunakan dan dikuasai secara penuh dan merata oleh orang Togutil sebagai bahasa ibu adalah bahasa Tobelo. Kedua, elemen-elemen budaya yang lain seperti kepercayaan akan *Jou Ma Dutu* atau *O Gikiri Moi* sebagai Tuhan, pencipta dan pemilik alam semesta maupun roh-roh leluhur (*o gomanga*) sebagai kekuatan yang mempengaruhi realitas kehidupan manusia dan lingkungannya pada dasarnya sama antara orang Tugutil dan orang Tobelo (Koentjaraningrat, n.d.). Ketiga, pada umumnya orang Togutil meskipun tinggal di kampung maupun yang terdapat dalam hutan akan menyatakan bahwa mereka adalah orang Tobelo. Faktor lain lagi adalah kaburnya batas *genealogis* antara *o hongana ma nyawa* atau orang Tugutil dengan *Tobelo ma nyawa* dalam keseharian mereka. Terdapat beberapa orang yang tinggal di pesisir pantai yang oleh masyarakat lokal dikenal sebagai orang Tobelo, namun apabila ditelusuri garis keturunannya dalam dua atau tiga generasi di atasnya, maka akan ditemukan sebagai orang Tugutil yang dahulu hidup didalam hutan (Martodirjo, 1984, 1991).

Peran Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memberikan keterangan bahwa dalam periode tahun 2016 hingga 2022, jumlah anak putus sekolah mencapai 2427 orang. Angka ini terdiri dari 994 anak tingkat SD, 870 anak tingkat SMP, dan 563 anak tingkat SMA. Keadaan ini, terutama terkait dengan anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan mereka, menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Penyebab anak putus sekolah dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Pendidikan di Desa Baburino sangat tergantung dari bantuan pemerintah, khusus pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dimana total dana yang diperlukan untuk membiayai

pendidikan sebanyak Rp. 1.018.800.000 (satu milyar delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembangunan lembaga sekolah dasar (SD), Rp. 852.000.000 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk pembangunan lembaga sekolah menengah pertama (SMP) dan Rp. 618.500.000 (enam ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan lembaga sekolah menengah atas (SMA), serta Rp. 269.000.000 (dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembangunan lembaga sekolah menengah kejuruan (SMK). namun untuk Desa Baburion, bantuan pendidikan berupa pembangunan lembaga pendidikan, agar anak-anak suku dalam dapat mendapatkan pendidikan dengan layak di Desa mereka.

Pembangunan sarana prasarana pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kabupaten dan Provinsi memang sudah terencana, namun dari segi aksesibilitas masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat suku Togutil. Minimalnya, perlu diupayakan agar pelaksanaan pembangunan mempertimbangkan jarak dan mengimplementasikan strategi yang mampu memengaruhi sikap masyarakat untuk menaruh minat terhadap pendidikan. Berdasarkan perspektif pendidikan, anak-anak suku Togutil telah mulai mengenal dunia pendidikan, walaupun masih sebatas Sekolah Dasar. Pengaruh pendidikan ini menciptakan keinginan dan cita-cita pada anak-anak suku Togutil, yang pada gilirannya memengaruhi cara dan kebiasaan belajar mereka. Penting untuk dicatat bahwa pembentukan kebiasaan belajar yang baik membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, melainkan melalui proses yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa Anak-anak suku Togutil memiliki kebiasaan belajar yang tidak terstruktur dalam waktu tertentu. Mereka belajar sesuai dengan keinginan pribadi, terkadang memilih untuk bermain dan terkadang fokus belajar.

Kondisi sekolah di dusun Titipa, yang menggunakan Balai Pertemuan yang dibangun oleh Kementerian Sosial di depan kampung mereka, sangat memprihatinkan. Sekolah tersebut merupakan sekolah darurat dengan induk sekolah berlokasi di desa Tukur-Tukur, yang berjarak sekitar 14 km dari dusun Titipa. Selain itu, hanya ada satu tenaga pendidik yang ditugaskan untuk mengajar di dusun tersebut. Kondisi ini dapat berdampak pada kemajuan pendidikan di dusun Titipa.

Sebagian besar orang tua memiliki peran yang minim terhadap kebiasaan belajar anak-anak mereka. Mereka cenderung lebih mengajak anak-anak untuk membantu dalam kegiatan berburu atau mencari makan di hutan. Sebagian dari mereka bahkan tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak, sehingga ada yang

hampir berhenti sekolah karena kurangnya dukungan dari orang tua. Di lapangan, terdapat hanya satu tenaga pendidik yang ditugaskan di dusun tersebut, dan ketidakefektifan guru tersebut dalam proses pengajaran dapat berdampak pada kondisi pendidikan di dusun tersebut. Anak-anak cenderung lebih memilih untuk bermalas-malasan daripada fokus belajar, dan hal ini bisa menjadi dampak dari kurangnya dukungan dan perhatian orangtua terhadap pendidikan formal. Beberapa orangtua dari suku Togutil juga menyesalkan pengaruh negatif ini terhadap anak-anak mereka. Perlu adanya upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk orangtua, tenaga pendidik, dan pemerintah, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mendukung perkembangan belajar anak-anak suku Togutil

Anak-anak suku Togutil memiliki kebiasaan belajar yang tidak terstruktur dalam waktu tertentu. Ini berarti bahwa mereka belajar sesuai dengan keinginan pribadi mereka. Terkadang, sebagian dari mereka memilih untuk bermain, sementara sebagian lainnya memilih untuk fokus belajar. Kondisi sekolah berada di Perkampungan Desa, dan ini dapat memengaruhi aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak suku Togutil. Peran orang tua memiliki dampak besar dalam merubah paradigma pendidikan. Orang tua cenderung lebih mengajak anak-anak mereka untuk membantu dalam kegiatan berburu atau mencari makan di hutan. Sebagian dari mereka bahkan tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap kelanjutan pendidikan anak-anak, sehingga ada yang hampir berhenti sekolah karena kurangnya dukungan dari orang tua. Selain itu, lokasi pemukiman suku Togutil yang jauh dari perkampungan juga menjadi hambatan tersendiri dalam mengakses pendidikan formal. Untuk meningkatkan kondisi pendidikan di suku Togutil, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk orang tua, tenaga pendidik, dan pemerintah, guna menciptakan pemahaman akan pentingnya pendidikan dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi perkembangan pendidikan anak-anak suku Togutil

Peran pemerintah, terutama dalam konteks pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab Kabupaten, seharusnya melibatkan pemberian ketrampilan khusus kepada tenaga pendidik. Hal ini bertujuan agar para pendidik dapat mengembangkan strategi atau model pembelajaran dalam upaya membangun kepercayaan orang tua dan anak-anak suku Togutil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat suku Togutil memerlukan pembangunan kepercayaan terhadap hal-hal baru, terutama mengingat sebelumnya mereka hanya mengenal komunitas dan lingkungan sendiri, yaitu hutan, kebun, dan aktivitas hidup yang tidak tergantung pada pihak lain.

Model, pola, dan pendekatan yang saat ini diterapkan masih bersifat konvensional, yang seharusnya diseragamkan untuk mempercepat prosesnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu berusaha meningkatkan ketrampilan khusus para pendidik, terutama guru di desa-desa dan pemukiman di mana suku Togutil telah menetap. Peningkatan ketrampilan ini diharapkan dapat mempercepat adaptasi terhadap model pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, termasuk dalam membangun kepercayaan di antara orang tua dan anak-anak suku Togutil. Upaya ini juga diarahkan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Salah satu faktor pendukung keberhasilan proses pendidikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Faktor ini menjadi krusial ketika mempertimbangkan peran pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap pendidikan anak suku di Desa Baburion. Pemerintah mengidentifikasi kekurangan sarana dan prasarana pendidikan formal untuk anak-anak suku dalam sebagai isu utama. Hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan mengungkapkan bahwa saat ini belum ada lembaga pendidikan yang disediakan oleh pemerintah untuk anak-anak suku dalam di Desa Baburion. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah sedang berusaha membangun sarana pendidikan seperti Paud, TK, dan SD di Baburion. Langkah-langkah ini diambil dengan memperhitungkan aksesibilitas Baburion yang masih dapat dijangkau. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat sarana dan prasarana sangat diperlukan agar aksesibilitas pendidikan tidak terlalu jauh bagi anak-anak suku. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan orang tua terhadap pemerintah, sehingga mereka bersedia melibatkan anak-anak mereka dalam pendidikan formal yang layak

Terkait dengan sarana prasarana, terutama di desa-desa yang ditempati oleh komunitas suku Togutil, khususnya dalam pendidikan dasar seperti Paud, TK, SD, dan SLTP, tampaknya masih belum memadai, terutama dari segi bangunan dan ketersediaan tenaga pengajar. Kekurangan ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah untuk menempatkan guru organik atau tetap, dan juga guru honorer, guna meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Diakui bahwa beberapa anak suku Togutil, yang orangtuanya telah menyatu dengan komunitas lain atau masyarakat setempat, masih belum sepenuhnya memiliki tingkat kepercayaan terhadap proses pendidikan berjenjang. Hal ini menyebabkan sejumlah kendala,

terutama setelah menyelesaikan SLTP dan berencana melanjutkan ke SMU. Pengaruh dari orang tua dapat mengakibatkan beberapa anak memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan, khususnya di kalangan masyarakat suku Togutil. Perlu adanya upaya yang lebih intensif dan holistik dari pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi tantangan ini dan membangun kepercayaan penuh terhadap proses pendidikan di kalangan suku Togutil.

Faktor Sosialisasi

Sosialisasi terjadi melalui kondisi lingkungan yang menyebabkan individu mempelajari pola kebudayaan dasar, seperti berbahasa, cara berjalan, duduk, makan, berperilaku sopan, dan sebagainya. Dalam perspektif ahmadi, tingkah laku manusia dapat dijelaskan sebagai reaksi terhadap tuntutan atau tekanan dari lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa sosialisasi mengenai peran pemerintah dalam pendidikan anak suku belum dilaksanakan. Hal ini terkait dengan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di Desa Baburion. Rencananya, sosialisasi akan dilaksanakan setelah pembangunan TK dan SD selesai. Dalam rangka tersebut, Dinas Pendidikan akan melakukan sosialisasi untuk menyampaikan pentingnya pendidikan kepada anak-anak suku Baburion. Hal ini bertujuan agar mereka dapat bersekolah dan mendapatkan hak-hak mereka dalam mengenyam pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi, ternyata diperlukan reformasi dalam model sosialisasi untuk membangkitkan rasa kepercayaan masyarakat suku yang masih terasing terhadap proses perubahan atau inisiatif pemerintah. Proses ini sebaiknya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Diketahui bahwa suku ini lebih sering terlibat dalam aktivitas di hutan atau kebun, dan kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus. Waktu yang dihabiskan mereka di hutan/kebun kadang-kadang lebih banyak dibandingkan di pemukiman yang telah ada. Oleh karena itu, pendekatan dan model sosialisasi untuk mereka seharusnya berbeda dengan masyarakat lokal lainnya. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui keluarga atau kelompok kecil, yang dilaksanakan di kebun/hutan secara berulang-ulang. Dengan demikian, kepercayaan mereka dapat tumbuh secara alami, dan mereka akan memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka untuk terlibat dalam pendidikan formal

Proses membangun kepercayaan untuk merubah sikap seseorang membutuhkan waktu, terutama bagi masyarakat suku terasing yang umumnya hanya mengenal komunitas dan orang-orang di sekitar mereka. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan serius agar dapat memengaruhi atau membangun kepercayaan dalam masyarakat suku yang mungkin belum

sepenuhnya siap untuk mengikuti perubahan. Perubahan tersebut dapat mengubah pola hidup lama menjadi hal yang baru.

Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Adapun beberapa faktor yang dapat menentukan tingkat keadaan ekonomi keluarga diantaranya yaitu tingkat pendapatan orang tua, tingkat pengeluaran keluarga, tabungan (simpanan), dan kepemilikan harta yang bernilai ekonomis. Pada kondisi ekonomi keluarga yang menengah ke atas maka anak-anaknya akan mendapatkan pengarahan terhadap pendidikan yang layak untuk bekal masa depannya. Namun berbeda dengan kondisi ekonomi keluarga yang menengah ke bawah, mereka kurang mendapatkan pengarahan tentang pentingnya pendidikan sehingga banyak diantara mereka yang lebih memilih untuk bekerja sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dibandingkan untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini merupakan salah satu faktor penghambat anak-anak di Indonesia banyak yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang kurang mendukung (Destiar A. Maghfirah, 2019). Tingkat tingginya angka putus sekolah di Indonesia dikarenakan pada tingkat rendahnya ekonomi masyarakat karena banyak masyarakat beranggapan bahwa biaya untuk memenuhi pendidikan anak sangatlah besar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Bupati memberikan prioritas pada kebijakan pendidikan gratis, terutama pada jenjang SD dan SMP secara khusus di wilayah Halmahera Timur. Namun, kebijakan ini tidak mencakup jenjang pendidikan SMA. Oleh karena itu, faktor ekonomi memainkan peran penting dalam memengaruhi akses pendidikan, terutama pada tingkat pendidikan lebih tinggi. Hal ini menjadi alasan mengapa anak-anak di wilayah tersebut tidak melanjutkan pendidikan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi, seperti SMA.

Faktor ekonomi seharusnya bukan menjadi salah satu faktor utama jika pemerintah daerah memiliki keinginan untuk mengatasi permasalahan ini. Ini merupakan upaya yang harus dilakukan untuk merubah sikap masyarakat atau suku terasing. Proses pendidikan di daerah ini harus menjadi perhatian khusus, tidak boleh diseragamkan dengan daerah-daerah lain. Kebijakan pemerintah daerah dapat melibatkan pemberian bantuan khusus, baik dalam bentuk biaya pendidikan maupun sarana perlengkapan lainnya untuk pendidikan. Sebagai contoh, dapat diberlakukan kebijakan pendidikan gratis di mana tidak ada pemungutan biaya. Hal ini dapat diimplementasikan secara bertahap hingga tingkat pemahaman masyarakat suku

meningkat, dan pada saat yang tepat, dapat diseragamkan dengan daerah lainnya. Pendekatan ini memperhitungkan konteks unik dan kebutuhan khusus suku Togutil, sehingga kebijakan pendidikan dapat lebih efektif dan sesuai dengan realitas setempat

Penutup

Kesimpulan

Peran pemerintah dalam pendidikan anak suku Togutil di Desa Baburion saat ini dapat dianggap baik, terutama dengan upaya pembangunan pendidikan yang tengah dilakukan di desa tersebut. Dinas Pendidikan juga memberikan perhatian khusus dengan memberikan akses kepada anak-anak suku Baburion untuk bersekolah di desa sebelah. Kebijakan yang tengah dibangun oleh pemerintah mencakup persiapan lembaga pendidikan formal untuk anak-anak suku Togutil. Beberapa faktor dapat mempengaruhi peran pemerintah dalam pendidikan anak suku dalam di Desa Baburion, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Pertama, faktor sarana dan prasarana pendidikan memiliki dampak signifikan. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai akan mendukung efektivitas proses pembelajaran. Kedua, faktor sosialisasi juga berperan penting. Upaya menyebarkan informasi tentang pentingnya pendidikan, baik kepada masyarakat suku dalam maupun di lingkungan sekitarnya, dapat membangun pemahaman dan dukungan terhadap pendidikan formal. Ketiga, faktor ekonomi memainkan peran dalam memengaruhi partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan. Kebijakan pemerintah yang mengatasi hambatan ekonomi, seperti memberikan bantuan biaya pendidikan, dapat membantu memastikan bahwa anak-anak suku dalam memiliki akses yang setara terhadap Pendidikan. Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam pendidikan anak suku Togutil di Desa Baburion mencakup berbagai faktor yang saling terkait dan pendekatan holistik diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal

Saran

Pemerintah perlu mengoptimalkan sistem kerja di sektor pendidikan untuk mengurangi angka anak putus sekolah. Optimasi juga harus terjadi pada bantuan sektor pendidikan untuk mendukung pembelajaran, serta perbaikan sarana dan prasarana di lembaga-lembaga pendidikan. Diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih spesifik untuk masyarakat suku Togutil, termasuk peningkatan tenaga pengajar dan model pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan komunitas suku Togutil. Keberpihakan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi

maupun kabupaten, untuk memberikan beasiswa dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi juga diperlukan.

Daftar Pustaka

- Bagong Suyanto, J. D. N. (n.d.). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Retrieved December 9, 2023, from <https://onesearch.id/Record/IOS16908.slims-10149?widget=1>
- Bayau, E., Kastanya, A., & Pelupessy, P. (2019). Potret Kehidupan Suku Togutil dan Kearifan Lokal Khususnya Obat-Obatan Tradisional dari Hutan. *MAKILA*, 13(1), 67–84. <https://doi.org/10.30598/makila.v13i1.2322>
- Destiar A. Maghfirah. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah Tingkat SMA/SMK NEGERI di Kota Mataram. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(3), 215–222. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/sakp/article/download/15862/15347>
- Dharma Setyawan Salam. (2007). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan
- Doa Busranto Latif. (2009). *ORANG "SUKU" TOGUTIL | SERBA SERBI TRADISI & BUDAYA ORANG TERNATE*. Ternate.Wordpress.Com. <https://ternate.wordpress.com/2009/03/25/mengenal-orang-togutil-suku-terasing-di-pulau-halmahera-2/>
- Drijarkara. (1980). *Drijarkara tentang Pendidikan*. Yayasan Kaniisius. Retrieved December 8, 2023, from <https://philpapers.org/rec/DRIDTP>
- Drost, S.J., J. (2000). *Reformasi Pengajaran: Salah Asuhan Orang tua?* Grasindo. Retrieved December 8, 2023, from http://perpus.labschool-unj.sch.id/labsjkt/index.php?p=show_detail&id=2321
- Duncan, C. R. (1997). Social Change and the Reformulation of Identity Among the Forest Tobelo of Halmahera Tengah. *Cakalele*, 8, 79-90. Retrieved December 8, 2023, from <http://hdl.handle.net/10125/4227>
- Hasan Bahrudin, S. J. (2021). Ethnic Behavior and Lifestyle of the Togutil Tribe in East Halmahera Regency, North Maluku. *International Journal of Education, Information Technology and Others*, 4(3), 392–402. <https://doi.org/DOI:10.5281/zenodo.5154423>

- Hasmawati, Jainudin Abdullah, & Sorofoli, D. (2020). Pendidikan Formal Suku Togutil di Desa Lili Kecamatan Maba Utara. *Jurnal Geocivic*, 3(1), 31–310. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/geocivic/article/view/1265/1728>
- Koentjaraningrat. (n.d.). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Retrieved December 9, 2023, from <https://books.google.co.id/books?id=94QpZ-x1I7QC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Martodirjo, Haryo. S. (1991). *Orang Togutil di Halmahera, Struktur dan Dinamika Sosial Masyarakat Penghuni Hutan (Disertasi)*, Bandung: Universitas Negeri Padjadjaran. Retrieved December 9, 2023, from <https://onesearch.id/Record/IOS1.INLISM00000000054876>
- Mawikere Marde Christian Stenly, H. S. (2022). Kajian Etnologi Guna Menentukan Substansi Sosio-Kultural sebagai Potensi Pengembangan Masyarakat yang Kontekstual kepada Suku Tugutil di Pulau Halmahera, Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(6), 57–74. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/issue/view/44>
- Mengenal Suku Togutil di Pedalaman Halmehera Tengah Panjimas*. (n.d.). Retrieved December 9, 2023, from <https://www.panjimas.com/news/2017/06/30/mengenal-suku-togutil-di-pedalaman-halmehera-tengah/>
- Moleong, L. J., & Surjaman, Tjun. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Retrieved December 6, 2023, from <https://onesearch.id/Record/IOS4100.slims-280/TOC>
- Nadra Wawan Suprianto, Hariyono, & Ramli M. (2016). Kebiasaan Belajar Anak dalam Keluarga Suku Togutil Halmahera Timur. *Jurnal Pendidikan*, 1(9), 1753–1763. <https://media.neliti.com/media/publications/210996-kebiasaan-belajar-anak-dalam-keluarga-su.pdf>
- Prakoso Aji. (2019). *Mengenal Suku Togutil; Suku Nomaden dari Halmahera*. Retrieved December 5, 2023, from <https://www.hipwee.com/list/mengenal-suku-togutil-suku-nomaden-dari-halmahera/>
- Risnawati, O., Matheosz, J. N., & Mawara, J. E. T. (2022). Aktivitas Mata Pencaharian Hidup Etnis Togutil di Desa Lelilef Waibulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera

Tengah. *Jurnal Holistik*, 15(4), 1–19.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/45407/40907>

Soekanto, S. B. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar* (42nd ed.). Raja Press. Retrieved December 8, 2023, from <https://onesearch.id/Record/IOS6530.ai:slims-3160?widget=1>

Tanlain Wens. (1989). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Retrieved December 8, 2023, from <https://onesearch.id/Record/IOS3774.JAKPU000000000054847>